

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2018 : 27).

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (bkn.go.id).

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bagian isu kebijakan yang strategis di Indonesia saat ini karena perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdampak pada upaya terciptanya *good governance*. Perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga berdampak luas pada bidang ekonomi dan politik. Perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada bidang politik akan mampu memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dibidang ekonomi, perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mendorong perbaikan iklim investasi (Nugraeni, 2019).

Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Administrasi Pimpinan Kota Bandar

Lampung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2024 serta Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi biro administrasi pimpinan. (biroadpim.lampung.go.id, 2021)

Standar akuntansi diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah dapat diperbandingkan, dan adanya kesamaan persepsi dan pemahaman antara penyaji laporan keuangan, pengguna laporan keuangan maupun pengawas laporan keuangan. Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah dan pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah diharapkan akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan urusan- urusan pemerintah dapat optimal. Perbaikan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diharapkan akan berimplikasi pada minimalnya praktik korupsi. Meskipun seperangkat perundangan dan peraturan mengenai pengelolaan keuangan telah memadai, pelaksanaan pengelolaan keuangan telah memadai, pelaksanaan pengelolaan keuangan negara tersebut masih rentan terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan uang publik. Penerapan sistem keuangan pada prakteknya tidak terlepas dari persepsi, wawasan, dan profesionalisme dari aparatur pemerintahnya itu sendiri (Asmiputri, 2017).

Permasalahan yang terjadi didapatkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Bandar Lampung tahun 2022 dapat disampaikan melalui laporan akuntabilitas kinerja bahwa Ketercapaian akuntabilitas kinerja dengan target kinerja yang ada di OPD Kota Bandar Lampung hanya mencapai target sebesar 58,06%. Sementara pada sisanya 41,94% belum mencapai target kinerja. Berikut

adalah tabel penguraian target kinerja melalui laporan keuangan yang ada pada LAKIP Kota Bandar Lampung :

Tabel 1.1 Uraian Target Kinerja Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja

<b>URAIAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>
Dinas Kesehatan	215.489.094.535,00	164.385.543.476,71
Dinas Tenaga Kerja	838.225.307,00	427.388.939,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2.365.800.000,00	1.679.197.380,00
Dinas Lingkungan Hidup	2.877.938.200,00	1.920.872.000,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	162.363.497,00	65.675.000,00
Dinas Perhubungan	7.011.037.635,00	6.354.109.774,00
Dinas Koperasi	3.981.200.000,00	3.283.137.438,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.621.536.000,00	673.089.456,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	515.000.000,00	332.052.369,00
Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.214.390.000,00	330.038.600,00
Dinas Perindustrian	4.939.434.045,00	3.119.637.333,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat	1.150.500.000,00	520.766.000,00

Sumber : LAKIP Kota Bandar Lampung Tahun 2022

Dalam siklus akuntansi sektor publik laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi. Dan berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, serta realisasi pembiayaan. Dapat disimpulkan bahwa Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah akan menghasilkan laporan keuangan instansi pemerintah yang baik. Pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah akan menjamin bahwa laporan keuangan tersebut disajikan secara benar dan wajar sesuai standar akuntansi keuangan pemerintahan sehingga informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut pengguna dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengambil keputusan (Aulia, 2021).

Penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat menunjukkan informasi berupa laporan keuangan yang menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, serta realisasi pembiayaan dan berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Penerapan akuntansi sektor publik memiliki hubungan erat yang kuat terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah karena digunakan sebagai suatu alat pengawasan dan pelaporan dalam akuntabilitas, karena pada dasarnya akuntansi sektor publik merupakan suatu proses pengumpulan, pengklasifikasian, analisis dan juga pembuatan laporan keuangan yang nantinya akan digunakan lembaga publik sebagai suatu alat pertanggungjawaban kepada publik. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin diterapkannya akuntansi sektor publik maka akan semakin baik pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Apabila akuntansi sektor publik masih jarang dilakukan, begitupun dengan tingkat akuntabilitas yang masih rendah, karena tujuan yang ditetapkan tidak sesuai dengan harapan, ukuran keberhasilan yang tak layak

untuk di ukur. program kegiatan ini ditetapkan tidak sesuai dengan sasaran. Maka dipandang perlu adanya penerapan akuntansi sektor publik serta dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik. Penelitian-penelitian mengenai akuntabilitas kinerja pemerintah telah banyak sebelumnya diteliti oleh para ahli. Seperti penelitian Fedrinawati (2017) pengaruh penerapan laporan akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah studi pada SKPD di Kabupaten Ponorogo secara parsial variabel kualitas laporan keuangan mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Secara simultan variabel penerapan laporan akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Komponen yang penting untuk menciptakan akuntabilitas kinerja yaitu dengan pengawasan kualitas laporan keuangan, karena pembuatan laporan yang tepat merupakan suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan sebuah syarat untuk terciptanya laporan keuangan yang akuntabel. Begitu juga dengan penelitian Oktaviani (2021) yang menyebutkan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam rangka menunjukkan akuntabilitas kinerja, maka antara lain diperlukan akuntabilitas keuangan yang dapat mengukur dan menilai upaya capaian hasil (Indah, 2022).

Instansi pemerintah yang sehat dapat mencerminkan kepentingan dan pengharapan kepada masyarakat terhadap pengelolaan anggaran dengan efisien dan efektif. Anggaran merupakan suatu aspek terpenting dalam menyusun rencana dan misi secara sistematis pada periode yang sudah ditentukan. Anggaran memiliki posisi yang penting dalam pengendalian manajemen sebagai informasi perencanaan keuangan agar dapat mengevaluasi kinerja para pegawai atau aparat negara. Adanya sasaran anggaran yang jelas akan membantu kinerja manajerial. Kejelasan sasaran anggaran tersebut akan memudahkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas oleh instansi pemerintah dalam mencapai tujuan instansi pemerintah. Kejelasan sasaran anggaran tersebut dapat dijadikan sebagai pengambilan

keputusan dan harus dipertanggungjawabkan oleh negara secara transparan. Peran anggaran sangat penting dalam lingkup pemerintahan terutama dalam akuntabilitasnya. Hal ini sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tidak hanya itu, menurut Mardiasmo (2018 : 28) anggaran merupakan dokumen antara pemerintah dan DPR/DPRD sebagai wakil rakyat, untuk masa yang akan datang.

Penelitian ini mengacu pada penelitian (Aulia, 2021) dengan judul Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pekanbaru. Pada penelitian ini membuktikan bahwa implementasi Akuntansi Sektor Publik berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa hasil pengujian secara simultan menyatakan bahwa penerapan akuntansi akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Yang membedakan penelitian ini adalah adanya penambahan variabel yaitu kejelasan sasaran anggaran karena kejelasan sasaran anggaran dapat membantu manajer untuk mencapai program yang telah ditentukan dan tujuan perusahaan/instansi pemerintah sebagaimana tertuang dalam perencanaan anggaran yang juga akan mempengaruhi kinerja dapat meningkat dan studi kasus dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandar Lampung. Berdasarkan fenomena dan latar belakang dan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandar Lampung)”**.

## **1.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini hanya sebatas dilakukan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandar Lampung. Penelitian ini hanya membahas apakah Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandar Lampung.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?
2. Apakah pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?
3. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan sehingga dapat menjadi bahan pemikiran dalam pengembangan ilmu akademik dan dapat dijadikan referensi atau bukti tambahan untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang topik yang sama, dan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Pembaca**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi pembaca menyediakan informasi terkait akuntansi sektor publik, pengawasan kualitas laporan keuangan dan kejelasan sasaran anggaran dalam hubungannya dengan akuntabilitas kinerja. Dapat digunakan bagi penulis, bagi instansi-instansi atau pihak lain.

#### **b. Bagi Pemerintah Daerah**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kontribusi sebagai bahan masukan dan gambaran tentang akuntansi sektor publik, pengawasan kualitas laporan keuangan dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini dilakukan dengan menuliskan bab yang terdiri atas lima bab. Dimana setiap bab akan disusun secara sistematis sehingga dapat menggambarkan hubungan antara satu bab dengan bab lainnya antara lain:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tentang “pengaruh penerapan akuntansi sektor public, pengawasan kualitas

laporan keuangan dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah”

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisikan tentang teori yang berhubungan dengan akuntansi sektor public, pengawasan kualitas laporan keuangan dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang definisi dan pengukuran variable populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini disajikan hasil, implementasi, analisis, dan pembahasan penelitian. Hasil dan implementasi dapat berupa gambar alat/program dan aplikasinya. Untuk penelitian lapangan hasil dapat berupa data (kualitatif maupun kuantitatif). Analisis dan pembahasan berupa hasil pengolahan data.

## **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi simpulan atas penelitian serta saran saran yang bermanfaat untuk pihak serta menyediakan refrensi bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**